



ANALYSIS OF GUNUNG KIDUL REGENCY GOVERNMENT POLICIES IN ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TARGET OF CLEAN WATER AND SANITATION FOR VILLAGES

ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL DALAM MENCAPAI TARGET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI

Angga Misbahuddin¹

¹Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: anggamisbahuddin20@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Correspondent

Angga Misbahuddin
anggamisbahuddin20@gmail.com

Key words:

Clean Water and Sanitation Policy, Sustainable Development Goals (SDGs), Sustainable Village Development

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2134 – 2151

ABSTRACT

This study analyzes the policies of the Gunung Kidul Regency Government in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) related to clean water and sanitation in villages. The main challenges faced include limited access to clean water and sanitation facilities, which impact the quality of life of the community. This research uses a qualitative descriptive method with secondary data obtained from various literature sources on policy evaluation, SDGs, and clean water and sanitation villages. The analysis indicates that sustainable development at the village level is crucial for improving the quality of life for current and future generations. The implementation of clean water and sanitation management policies in Gunung Kidul Regency has shown positive results, with significant improvements in access from 2017 to 2021. Key success factors include infrastructure enhancement, community education, water resource protection, and multi-sector collaboration. The PAMSIMAS program and sanitation infrastructure assistance have significantly contributed to improving access to clean water and sanitation. Community education and outreach have raised awareness of the importance of sanitation and hygiene, while water source protection policies help maintain the quality and sustainability of clean water. Collaboration between the government, NGOs, and the private sector strengthens policy implementation through the provision of funding, technology, and resources. Although these policies have been effective, future challenges will focus on maintenance, quality improvement, and facility sustainability, especially in the face of the climate crisis. Cross-sector collaboration and continuous education will remain key to achieving inclusive and sustainable development goals.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

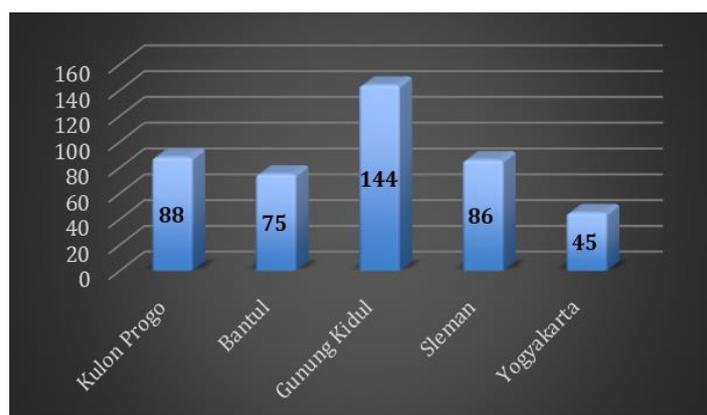
INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden Hanifah Fitri <i>hanifahfitri464@gmail.com</i></p> <p>Kata kunci: Kebijakan Air Bersih dan Sanitasi, Sustainable Development Goals (SDGs), Pembangunan Berkelanjutan Desa</p> <p>Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i></p> <p>Hal: 2134 - 2151</p>	<p>Penelitian ini menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait desa layak air bersih dan sanitasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur tentang evaluasi kebijakan, SDGs, dan desa layak air bersih dan sanitasi. Analisis menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di tingkat desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat saat ini dan masa depan. Implementasi kebijakan manajemen air bersih dan sanitasi di Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan hasil positif, dengan peningkatan akses yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2021. Kebijakan peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, perlindungan sumber daya air, dan kolaborasi multi-sektor menjadi faktor kunci keberhasilan. Program PAMSIMAS dan bantuan infrastruktur sanitasi berkontribusi besar dalam memperbaiki akses sanitasi dan air bersih. Edukasi dan penyuluhan masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi dan kebersihan, sementara kebijakan perlindungan sumber air membantu menjaga kualitas dan keberlanjutan air bersih. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta memperkuat implementasi kebijakan melalui penyediaan dana, teknologi, dan sumber daya. Meskipun kebijakan ini efektif, tantangan ke depan akan berfokus pada pemeliharaan, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan fasilitas, terutama dalam menghadapi krisis iklim. Kolaborasi lintas sektor dan edukasi berkelanjutan akan tetap menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.</p> <p><i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i></p>

PENDAHULUAN

Lahirnya sebuah konsep Sustainable Development Goals (SDGs), didasarkan atas adanya kepentingan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan untuk seluruh dunia. Perlu dipahami bahwa terdapat kepentingan yang sama bagi sebagian masyarakat, bahwa sangat penting untuk melaksanakan agenda pembangunan ekonomi yang berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat disegala aspek. Maka hadirnya SDGs menjadi konsep yang mampu menghadirkan konsensus tentang sinergi lintas ekonomi, inklusi sosial, ketahanan dan keberlanjutan lingkungan guna membangun pemerintahan yang baik untuk setiap bangsa dan negara serta masyarakatnya di masa yang akan datang (Hutajulu et al., 2024). Konsep SDGs sendiri merupakan konsep yang telah disepakati bersama oleh

berbagai negara di dunia yang salah satunya yaitu Indonesia. Dalam kaitannya dengan SDGs salah satu poin penting yaitu tentang akses air bersih dan sanitasi. Akses air bersih memiliki keterkaitan yang erat dengan sanitasi guna memberikan hak hidup masyarakat yang layak (Hargono et al., 2022).

Berkaitan dengan SDGs salah satu poin tujuannya yaitu adanya ketersediaan air bersih dimulai dari proses pengelolannya hingga sanitasi yang berkelanjutan (Trisnanto et al., 2024). Namun faktanya masih banyak wilayah di Indonesia terutama desa yang masih belum memiliki akses air bersih yang layak hal itu dikarenakan hampir sepanjang 2021 terdapat 10.683 desa/kelurahan yang mengalami pencemaran air (BPS 2022). Padahal menurut Krisdhianto and Sembiring (2016) bahwasanya dengan kebutuhan air bersih yang belum mencukupi masyarakat, maka akan secara langsung mempengaruhi sanitasi lingkungan masyarakat. Menambahkan dari studi Kusumawardhan dan Auliya (2019) bahwasanya ketersediaan air bersih menjadi bagian penting dari kebutuhan masyarakat karena merupakan sumber air minum dan ketersediaan sanitasi yang akan membantu dalam mencegah berbagai penyakit. Selain itu menurut Misbahuddin (2023) bahwasanya banyak indikator yang mempengaruhi ketersediaan air bersih yang secara tidak langsung membutuhkan manajemen *smart environment* yang terstruktur dan melibatkan semua pihak.



Gambar 1. Jumlah Desa di Provinsi DI Yogyakarta
Source: Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta 2022

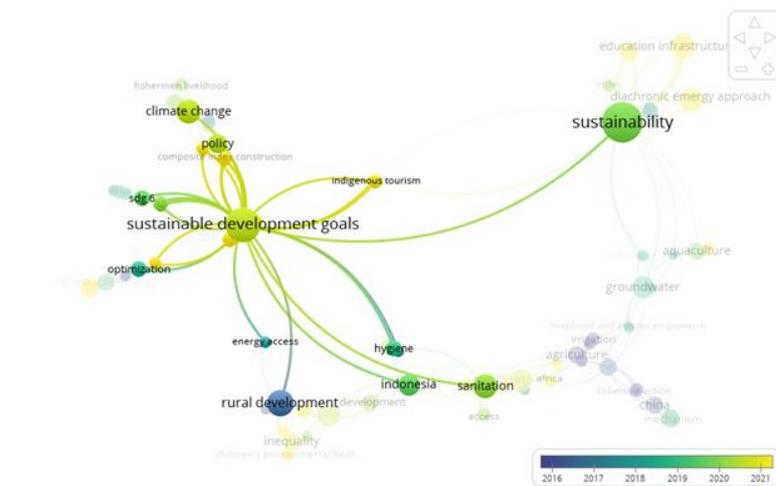
Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang ada di DI Yogyakarta yang memiliki Desa paling banyak di DI Yogyakarta yaitu 144 Desa. Bahkan jumlah desa di Kabupaten Gunung Kidul sangat jauh dibandingkan daerah lain yang tidak sampai 100 desa. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah, dikarenakan harus bisa mengetahui dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, apalagi dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Gunung Kidul mengalami dampak dari climate change yang menyebabkan terjadinya krisis air bersih (Misbahuddin, 2021). Isu krisis air bersih hanya satu dari sekian banyak isu yang hadir di desa yang tentunya pasti berada di berbagai desa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Namun isu air selalu memiliki kaitannya dengan sanitasi yang ada sebagaimana menurut Celesta dan Fitriyah (2019) bahwasanya sumber air minum harus memenuhi syarat kesehatan untuk rumah tangga sehingga kondisi sanitasi sangat penting untuk tidak mencemari air. Apalagi

jika berbicara desa yang mana masih banyak desa yang belum memiliki infrastruktur yang menunjang sanitasi yang ada.

Desa merupakan suatu lingkungan terkecil dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit namun memiliki persoalan sosial ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan kota (Iskandar, 2020). Menambahkan dari studi dari Iskandar (2020) bahwasanya masalah lain yang sering hadir di desa yaitu masalah Kesehatan dan Pendidikan, sehingga pelaksanaan SDGs sangat penting dan berkontribusi dalam perbaikan isu-isu yang ada.

Dalam mengimplementasikan berbagai program SDGs di desa dibutuhkan sebuah kebijakan dari pemerintahan setempat. Hal itu merupakan sebuah keharusan guna menjadi landasan dari capaian yang ingin didapatkan. Kaitannya dengan kebijakan publik, menurut Nugroho (2021) mendefinisikan sebuah kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, dalam artian pemerintah sebagai bentuk strategi untuk merealisasikan tujuan dari suatu negara. Anderson (2011) menjabarkan lebih dalam bahwa kebijakan publik memiliki beberapa implikasi yaitu pertama, kebijakan public itu berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan perilaku yang secara serampangan. Kebijakan publik ekstensif tidak terjadi begitu saja, melainkan direncanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sistem politik (Winarno, 2016). Kedua, kebijakan adalah instruksi atau pola tindakan oleh pejabat pemerintah, bukan keputusan individu (Tedi dan Endra, 2021). Kebijakan tersebut tidak hanya mencakup keputusan untuk mengatur masalah, tetapi juga keputusan untuk mengimplementasikannya. Ketiga, politik bukanlah apa yang diinginkan pemerintah, tetapi apa yang sebenarnya dilakukan untuk mengatur perdagangan, mengekang inflasi, atau mendorong perumahan rakyat (Nugroho, 2023). Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif atau negative (Permatasari, 2020).

Pada dasarnya terdapat banyak penelitian yang berhubungan dengan kebijakan publik tentang desa layak air bersih dan sustainable development goals. Dimulai dari berbagai pendekatan, teori yang digunakan, metode hingga hasil yang didapatkan. Dari hal tersebut penulis melihat terdapat beberapa gap yang masih perlu diperdalam. Tinjauan pustaka yang diuraikan dalam penelitian ini berkaitan erat dengan latar belakang masalah yang diuraikan dalam penelitian ini.



Gambar 2. Visualisasi Jaringan Penelitian Terdahulu Terkait Sustainable Development Goals dan Pembangunan Perdesaan

Sumber: Analisa Penulis Melalui Vos Viewer

Gambar di atas merupakan pemetaan jaringan studi sebelumnya terkait sustainable development goals dan pembangunan desa. Lima warna menunjukkan perbedaan tahun dalam penelitian. Warna biru tua adalah "rural development" dari 2016 hingga 2017. Lalu ada biru muda yaitu "Hygiene" "Energy Acces" dan "Optimization". Kemudian warna hijau tua melibatkan "sustainability", "Indonesia", and "sdg 6". Warna keempat adalah hijau muda yang memiliki beberapa kata kunci, yaitu "policy" dan "climate change". Kemudian warna terakhir adalah kuning dengan kata kunci "indigenous tourism". Dalam jaringan ini, jaringan "sustainable development goals" terhubung ke semua jaringan yang disebutkan di atas terutama pada jaringan rural development. Dengan demikian, penelitian terkait sustainable development goals menjadi kajian yang menarik untuk dibahas, khususnya mengenai pembangunan desa layak air bersih dan sanitasi yang merupakan salah satu poin dalam sustainable development goals.

Kebijakan publik merupakan luaran dari peran pemerintah dalam mencapai target dan melayani masyarakat. Sehingga perlu mengetahui bagaimana hasil dari sebuah kebijakan hingga bagaimana tahapan dan target yang telah dicapai. Salah satu poin pada SDGs yaitu Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi yang menjadi salah satu target yang sangat menarik untuk diketahui bagaimana hasil dari kebijakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian dengan cara mendeskripsikannya melalui pernyataan-pernyataan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014). Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data yang penulis kumpulkan berasal dari berbagai literature tentang evaluasi kebijakan, sustainable development goals dan desa layak air bersih dan sanitasi. Selain itu, sumber pendukung lainnya adalah buku cetak, situs resmi dan artikel yang telah diidentifikasi, dianalisis, diklarifikasi dan ditafsirkan, sehingga menjadi karya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian pada masa sekarang yang kemudian dijelaskan, dianalisis dan disajikan sedemikian rupa sehingga menjadi gambaran yang sistematis. Teknik pengolahan data menggunakan pola deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah pengolahan data tentang perilaku, fenomena, peristiwa, masalah, atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pengertian tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Desa Layar Air Bersih dan Sanitasi

Dalam kaitannya dengan pembangunan, pembangunan yang bijak bagi masyarakat merupakan pembangunan yang berkelanjutan yang mana bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia, baik pada generasi saat ini ataupun generasi yang akan datang, dengan syarat bahwa tidak melakukan eksploitasi

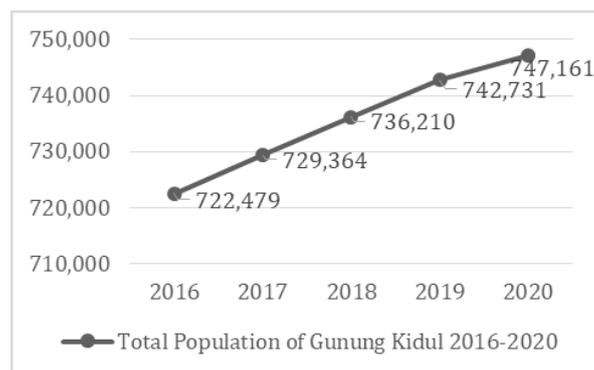
sumber daya alam yang berlebihan pada masa sekarang. Hal itu bisa dicapai dengan empat elemen tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Pertumbuhan dan keadilan ekonomi
2. Pembangunan social
3. Konservasi sumberdaya alam
4. Pemerintahan yang baik

Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, ke empat elemen tersebut saling mendukung satu sama lainnya, guna menciptakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang benar-benar ada. Hal itu didukung dengan adanya Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang diadakan di Rio De Jeneiro Brazil, pada Juni 2012, yang mana membahas agenda dari pembangunan berkelanjutan yang mana kita ketahui bersama disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan satu bagian dari tujuan, sasaran, dan indicator pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal. Secara tahapan SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang telah lebih dulu di implementasikan oleh negara-negara di seluruh dunia sejak 2001 hingga tahun 2015.

Hubungan pembangunan yang hadir antara desa dengan adanya konsep SDGs sangatlah erat, karena banyak isu-isu di desa yang sangat membutuhkan pendekatan SDGs didalamnya. Isu tersebut mulai dibicarakan akhir-akhir ini, terutama dalam aspek penyediaan sumber air bersih dan sanitasi yang layak. Hal itu muncul semenjak bergantinya nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada era Jokowi-dodo. Selain itu hadirnya SDGs sebagai agenda pembangunan dalam menyelamatkan bumi. Pada dasarnya isu mengenai lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan desa, karena desa menjadi wilayah yang secara demografi dekat dengan alam.

Berkaitan dengan pembangunan desa pada aspek SDGs maka tidak jauh dengan pembangunan desa layak air bersih dan sanitasi yang merupakan salah satu poin dalam SDGs yaitu poin ke 6. Sehingga ketersediaan air bersih dan sanitasi merupakan hal yang penting dalam pembangunan desa. Menurut Payment dan Hunter (2001) bahwasanya kaitannya dengan ketersediaan air, memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika dari kependudukan suatu wilayah terutama dalam aspek ekosistem. Selain itu tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk menurut Mujiyani, Rachmawati & Hidayati (2006) memiliki implikasi terhadap akses dalam memperoleh air bersih. Berkaitan dengan hal tersebut menurut data BPS Gunung Kidul (2021) bahwasanya dalam kurun waktu 2016-2020 terjadi peningkatan penduduk di Gunung Kidul.



Gambar 3. Total Populasi Gunung Kidul 2016-2020

Sumber: BPS Gunung Kidul (2021)

Meningkatnya penduduk di Gunung Kidul secara langsung akan mempengaruhi penggunaan air bersih dan sanitasi. Menurut Hasid et al. (2022) bahwa, perkembangan wilayah serta pertumbuhan ekonomi guna melihat ekonomi khusus memiliki dampak pada kebutuhan air yang ada, atau lebih tepatnya air baku, seperti meningkatnya masyarakat dan permintaan terhadap air, sehingga diperlukan suatu pengelolaan air secara berkelanjutan dan terpadu. Konsep pengelolaan air terpadu itu dimulai dengan proses membangun persepsi tentang sumber-sumber air, proses membangun komitmen untuk mendayagunakan air disertai kesadaran tentang pentingnya konservasi serta menyikapi secara kolektif tentang cara pengelolaan agar dapat didayagunakan dengan hasil yang optimal dan berkelanjutan (Suman et al., 2019). Walaupun banyak sekali variable yang menjembatani hubungan antara ketersediaan air bersih dengan penduduk, diantaranya seperti teknologi, kebijakan, dan budaya. Dengan kondisi demikian maka sangat penting untuk desa-desa yang ada di Gunung Kidul memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasinya.

Implementasi Kebijakan Manajemen Air Bersih dan Sanitasi

Air bersih merupakan salah satu aspek atau kebutuhan penting dari keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan akan air bersih tidak hanya pada aspek ekonomi semata namun pada aspek sederhana yaitu kebutuhan rumah tangga di desa. Air merupakan sumber daya alam yang unik dibandingkan dengan sumber daya lainnya, karena sifatnya yang terbarukan dan sangat dinamis. Artinya air memiliki sumber yang cukup banyak salah satunya ketika terjadi hujan. Namun bukan berarti air selalu dalam kondisi ada dalam lingkungan masyarakat. Karena pada kondisi tertentu air dapat menjadi tidak terbarukan. Menurut Kodoatie dan Roestam (2010) dalam prosesnya air bersih hadir dalam kondisi geologi tertentu dimana perjalanan air tanah membutuhkan waktu ribuan tahun, sehingga jika air tanah selalu dikonsumsi berlebihan sebelum prosesnya selesai maka air akan habis juga.

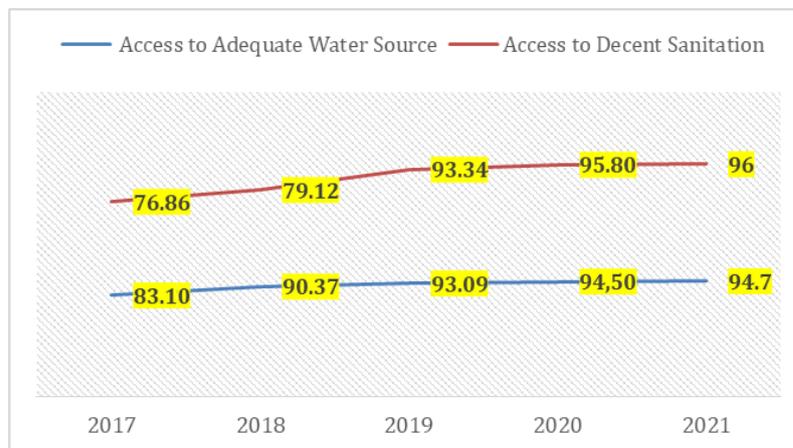
Jika berkaca pada bagaimana aktifitas masyarakat desa sekarang, maka air bersih digunakan hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam mendukung sanitasi. Kegiatan mencuci, memasak, mandi, hingga minum merupakan aktifitas yang membutuhkan air bersih. Oleh karena itu, kebutuhan akan air merupakan keniscayaan. Namun dalam implementasinya kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun sumber daya air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat di pedesaan.

Mengenai kebijakan itu sendiri, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan menurut Syahputra (2016) dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

1. Perilaku lembaga atau instansi yang bertugas menjalankan program sesuai dengan alur pelaksanaan dan tujuannya.
2. Berbagai jaringan kekuasaan dalam hal politik, ekonomi dan sosial yang memiliki pengaruh langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat.

3. Efek atau dampak yang diinginkan atau tidak diinginkan terhadap program yang telah dilaksanakan.

Jadi suatu kebijakan dapat berupa peraturan atau program yang nantinya dapat berdampak pada masyarakat berdasarkan pengambilan keputusan bersama. Oleh karena itu implementasi menjadi penting karena dari situ dapat dinilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Namun di sisi lain menurut Purnomo (2017) Salah satu masalah penting dalam pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Salah satu aspek yang dapat dilihat dari pengelolaan ketersediaan air bersih di Gunung Kidul adalah dengan melihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mendistribusikan air bersih yang merupakan air minum dan tersedianya fasilitas toilet sebagai salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat.



Gambar 4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak dan Sumber Air Bersih di Kabupaten Gunung Kidul
Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta 2022

Grafik yang menggambarkan "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak dan Sumber Air Bersih di Kabupaten Gunung Kidul" menunjukkan perkembangan signifikan dalam aksesibilitas terhadap layanan sanitasi dan air bersih selama periode 2017 hingga 2021. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai keberhasilan implementasi kebijakan manajemen air bersih dan sanitasi oleh pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait. Berikut ini adalah analisis yang lebih rinci mengenai tren data dan kaitannya dengan implementasi kebijakan yang relevan.

Tren Akses Sanitasi Layak

1. Tahun 2017:

Pada tahun 2017, sekitar 76,86% rumah tangga di Kabupaten Gunung Kidul memiliki akses terhadap sanitasi layak. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari seperempat populasi rumah tangga masih belum memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, terutama dalam hal penyakit yang berhubungan dengan lingkungan dan kebersihan. Permasalahan utama yang dihadapi pada tahun ini kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur sanitasi, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang layak, serta minimnya intervensi program yang terstruktur di lapangan.

2. Tahun 2018:

Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2018, di mana persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat menjadi 79,12%. Kenaikan ini menandakan adanya upaya awal yang lebih intensif dalam memperbaiki kondisi sanitasi di masyarakat. Beberapa intervensi yang mungkin telah dilakukan antara lain penyuluhan sanitasi, pembangunan toilet umum dan individu, serta perbaikan sistem pembuangan limbah domestik. Dukungan dari pemerintah pusat, daerah, dan berbagai LSM kemungkinan berkontribusi dalam capaian ini.

3. Tahun 2019:

Pada tahun 2019, persentase meningkat drastis menjadi 93,34%, mencerminkan lonjakan signifikan dalam penyediaan fasilitas sanitasi. Pencapaian ini merupakan indikasi bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan. Pada tahap ini, kemungkinan sudah ada implementasi program sanitasi berbasis masyarakat (Community-Led Total Sanitation/CLTS) yang mengedepankan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan fasilitas sanitasi secara mandiri. Kebijakan subsidi atau bantuan material untuk pembangunan sanitasi juga mungkin telah diterapkan untuk mendorong percepatan akses.

4. Tahun 2020:

Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak terus meningkat hingga mencapai 95,80% pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan keberlanjutan program sanitasi yang semakin matang dan menyeluruh. Tahun ini juga kemungkinan besar dipengaruhi oleh adaptasi terhadap pandemi COVID-19 yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi sebagai bagian dari pencegahan penyakit. Intervensi kebijakan seperti penyediaan fasilitas cuci tangan di area publik dan promosi kebiasaan sanitasi bersih turut mendukung peningkatan ini.

5. Tahun 2021:

Pada tahun 2021, persentase akses terhadap sanitasi layak mencapai 96%. Angka ini mengindikasikan keberhasilan hampir menyeluruh dalam penyediaan sanitasi yang layak bagi rumah tangga di Kabupaten Gunung Kidul. Meskipun peningkatannya tidak setajam tahun-tahun sebelumnya, stabilitas pada angka ini menunjukkan bahwa upaya-upaya telah mencapai tingkat optimal. Fokus ke depan perlu diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas sanitasi, termasuk manajemen limbah yang lebih baik dan penerapan teknologi sanitasi yang ramah lingkungan.

Tren Akses ke Sumber Air Bersih

1. Tahun 2017:

Pada tahun 2017, akses rumah tangga ke sumber air bersih berada di angka 83,10%. Pada tahap ini, tantangan utama mungkin berkisar pada ketersediaan sumber air yang memadai, terutama di wilayah yang rentan terhadap kekeringan atau kondisi geografis yang sulit dijangkau. Upaya awal kemungkinan melibatkan perbaikan jaringan distribusi air, pengembangan sumber air alternatif, dan perbaikan kualitas air melalui program perawatan infrastruktur air minum.

2. Tahun 2018:

Akses meningkat tajam menjadi 90,37% pada tahun 2018. Ini menunjukkan keberhasilan intervensi yang lebih terarah, seperti pembangunan jaringan perpipaan baru, penyediaan air bersih melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), serta peningkatan kapasitas sumur

bor dan sumber air lain yang dikelola masyarakat. Kebijakan pengelolaan air bersih mulai memperlihatkan dampak yang positif, dengan semakin banyak rumah tangga yang dapat memanfaatkan sumber air yang aman dan layak konsumsi.

3. Tahun 2019:

Pada tahun 2019, akses air bersih sedikit meningkat menjadi 93,09%. Meskipun kenaikannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, ini masih menunjukkan progres yang baik dalam pencapaian akses air bersih. Di tahun ini, fokus mungkin sudah mulai bergeser ke peningkatan kualitas air dan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan, termasuk pengendalian pencemaran air dan perlindungan daerah resapan air.

4. Tahun 2020:

Akses terhadap air bersih mencapai 94,50% pada tahun 2020. Perkembangan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih selama masa pandemi, di mana kebersihan menjadi faktor utama dalam pencegahan penyebaran penyakit. Selain itu, perluasan jaringan air bersih dan peningkatan teknologi pengolahan air turut berperan dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang lebih luas.

5. Tahun 2021:

Pada tahun 2021, persentase akses tetap stabil di angka 94,7%. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Gunung Kidul telah memiliki akses ke air bersih yang memadai. Tantangan yang dihadapi pada tahap ini lebih terfokus pada pemeliharaan dan keberlanjutan sumber air, termasuk mitigasi risiko penurunan kualitas air akibat pencemaran dan over-extraction.

Implementasi kebijakan manajemen air bersih dan sanitasi di Kabupaten Gunung Kidul mencakup berbagai program dan strategi yang telah terbukti efektif. Kebijakan ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, yang bekerja sama untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan sanitasi serta air bersih.

1. Peningkatan Infrastruktur:

Kebijakan peningkatan infrastruktur menjadi prioritas utama, dengan pembangunan toilet umum, peningkatan fasilitas pengolahan air, dan pengembangan jaringan distribusi yang lebih merata. Program PAMSIMAS dan bantuan infrastruktur sanitasi menjadi contoh program yang efektif dalam mempercepat pencapaian target akses sanitasi dan air bersih.

2. Edukasi dan Penyuluhan Masyarakat:

Edukasi mengenai pentingnya sanitasi dan kebersihan menjadi bagian penting dari kebijakan, yang dilakukan melalui kampanye publik, pelatihan kader sanitasi, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas telah membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara fasilitas yang ada.

3. Kebijakan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Air:

Perlindungan terhadap sumber daya air bersih dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian integral dari kebijakan sanitasi. Upaya seperti konservasi sumber air, penghijauan daerah tangkapan air, serta pengendalian pencemaran air telah membantu menjaga kualitas dan keberlanjutan air bersih.

4. Kolaborasi Multi-Sektor:

Kerja sama lintas sektor antara pemerintah, LSM, dan swasta dalam penyediaan dana, teknologi, dan sumber daya lainnya memperkuat implementasi kebijakan. Program kemitraan dengan sektor swasta, misalnya dalam penyediaan filter air dan teknologi pengolahan limbah, juga telah berkontribusi dalam meningkatkan akses dan kualitas sanitasi.

SIMPULAN

Pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, khususnya terkait dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi, merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat saat ini dan di masa depan. Pembangunan berkelanjutan mencakup empat elemen utama: pertumbuhan dan keadilan ekonomi, pembangunan sosial, konservasi sumber daya alam, dan pemerintahan yang baik. Keempat elemen ini saling mendukung untuk menciptakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang efektif dan nyata, yang tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang diluncurkan oleh PBB pada 2012. SDGs, yang merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs), memberikan panduan universal untuk berbagai isu pembangunan, termasuk akses air bersih dan sanitasi layak. Dalam konteks Kabupaten Gunung Kidul, peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan akan air bersih dan fasilitas sanitasi. Peningkatan penduduk yang signifikan selama periode 2016-2020 mempengaruhi penggunaan air bersih dan sanitasi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan manajemen air yang terpadu dan berkelanjutan untuk memastikan akses yang memadai. Implementasi kebijakan untuk manajemen air bersih dan sanitasi di Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan tren peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan sumber air bersih dari tahun 2017 hingga 2021, dengan persentase akses yang terus meningkat.

1. Peningkatan Infrastruktur: Kebijakan peningkatan infrastruktur, seperti pembangunan toilet umum dan pengembangan jaringan distribusi air, telah berkontribusi besar terhadap perbaikan akses sanitasi dan air bersih. Program PAMSIMAS dan bantuan infrastruktur sanitasi merupakan contoh sukses dalam mencapai target tersebut.
2. Edukasi dan Penyuluhan Masyarakat: Edukasi mengenai pentingnya sanitasi dan kebersihan melalui kampanye publik dan pelatihan telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas memainkan peran penting dalam pemeliharaan fasilitas sanitasi.
3. Kebijakan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Air: Upaya perlindungan sumber daya air dan pengelolaan lingkungan, seperti konservasi dan penghijauan, membantu menjaga kualitas dan keberlanjutan air bersih.
4. Kolaborasi Multi-Sektor: Kerja sama lintas sektor antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta dalam penyediaan dana, teknologi, dan sumber daya lainnya memperkuat implementasi kebijakan. Kemitraan dengan sektor swasta juga berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas sanitasi.

Secara keseluruhan, kebijakan manajemen air bersih dan sanitasi di Kabupaten Gunung Kidul telah menunjukkan hasil yang efektif, dengan akses yang meningkat secara signifikan. Namun, tantangan ke depan akan berfokus pada pemeliharaan, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan fasilitas sanitasi dan sumber air bersih

bahkan hingga pada krisis iklim yang sering menghantui Gunung Kidul dengan kemarau panjang. Kolaborasi antara berbagai pihak dan fokus pada pendidikan masyarakat akan terus menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E. (2011). Democracy, Public Policy, and Lay Assessments of Scientific Testimony1. *Episteme*, 8(2), 144-164.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. (2021). *Kabupaten Gunung Kidul dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/publication/download.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/download.html>
- Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2022*. Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://bappeda.jogjaprov.go.id/publication/download.html>
- Celesta, A. G., & Fitriyah, N. (2019). Gambaran Sanitasi Dasar Di Desa Payaman, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(2), 83-90.
- Hargono, A., Waloejo, C., Pandin, M. P., & Choirunnisa, Z. (2022). Penyuluhan Pengolahan Sanitasi Air Bersih Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Mengare, Gresik. *Abimanyu: Journal of Community Engagement*, 3(1), 1-10.
- Hasid, H. Z., SE, S., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.
- Hutajulu, H., Runtunuwu, P. C. H., Judijanto, L., Ilma, A. F. N., Ermanda, A. P., Fitriyana, F., ... & Wardhana, D. H. A. (2024). *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kodoatie, R. J. (2010). dan Roestam,“. *Tata Ruang Air [Water Spatial Planning]*“, Penerbit Andi.
- Krisdhianto, A., & Sembiring, E. (2016). Evaluasi Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan Di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 22(1), 21-30.

- Kusumawardhana, I., & Auliya, A. A. N. (2019). UNICEF and the WASH: Analisis Terhadap Peran UNICEF Dalam Mengatasi Masalah Ketersediaan Air Bersih di India. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 1(2), 341-378.
- Misbahuddin, A. (2023). SMART ENVIRONMENT: ANALYSIS OF WATER MANAGEMENT POLICY IN MAKASSAR. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(2), 114-130. <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3588>
- Misbahuddin, A. (2021). Clean water crisis and climate change: study of clean water resource management in Gunung Kidul. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 5(1), 117-132.
- Moleong, L. J. (2014). *Qualitative research methods revised edition*. Bandung: PT Teen Rosdakarya, 5(10).
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Dari Jenis Hingga Arti Penting*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Payment, P., & Hunter, P. R. (2001). Endemic and epidemic infectious intestinal disease and its relationship to drinking water. *Water quality: guidelines, standard and health*. London: IWA Publishing WHO, 61-88.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Suman, A., Putra, R. E. N., Amalia, S. K., Hardanto, H., Kusuma, C. A., & Amir, F. (2019). *Ekonomi lokal: pemberdayaan dan kolaborasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Trisnanto, A., Steffani, B. G., Romeo, S. R., Siwi, E. P. R., & Adinata, A. Z. (2024). *Capacity Building dan Masyarakat Desa*. UB Press.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.